



RENCANA KERJA

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (SETELAH REVIU INSPEKTORAT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**
2026



Jl. Majapahit Nomor 5 pekalongan 51111
Telepon (0285) 421243 / 420223 fax (0285) 421243
email : diskominfo@pekalongankota.go.id
email : diskominfo@gafe.pekalongankota.go.id

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026.

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.	12
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	37
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
BAB IV.....	52
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
4.1 Rencana Kerja	52
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	52
BAB V.....	64
PENUTUP	64
5.1. Catatan Penting	64
5.2. Kaidah Pelaksanaan	64
5.3. Rencana Tindak Lanjut	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan tersebut, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Renja-PD Tahun 2026 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman pada RKPD 2026 yang sasaran pokok arah kebijakannya mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Renja Tahun 2026 dalam penyusunannya diarahkan untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, yaitu ***“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”***

Renja Tahun 2026 dalam penyusunannya juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Terdapat 9 (sembilan) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal
8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).
 11. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 21 tanggal 4 Juli 2025).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi Dinkominfo Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja dinkominfo kota pekalongan antara lain adalah :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinkominfo Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2026, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Dinkominfo Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinkominfo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Dinkominfo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selaian itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan merupakan awal RPJMD Tahun 2021-2026, di Tahun 2025 Dinas Kominfo mengampu 2 indikator Utama Kota dan 5 Indikator Renstra. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun ini Dinas Kominfo mempunyai 7 target indikator program dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Renstra yang belum tercapai di tahun 2024, diantaranya :

- Indeks domain tata kelola SPBE tercapai 3.30 dari target akhir yang dipasang 3.34
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral tercapai 94,84% dari target akhir yang dipasang 98,50%
- Nilai Keterbukaan informasi publik (KIP) tingkat Kota tercapai skor 96,03 dari target akhir yang dipasang 97,00
- Nilai SAKIP tercapai 83,40 dari target akhir yang dipasang 87,80

2. Indikator program yang mencapai target atau melebihi target , yaitu :

- indeks aspek Teknologi Informasi dan komunikasi tercapai 3,25 dari target akhir yang dipasang 3,10

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Ada beberapa faktor, diantaranya :

1. Pagu yang dipasang sudah dilakukan analisa perumusan target.
2. Efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan jumlah anggaran yang direncanakan dapat meningkatkan kinerja yang ditentukan.
3. Peningkatan kinerja dalam mengelola program dan kegiatan.

Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target akhir pada indikator renstra diantaranya :

1. capaian indeks domain tata kelola SPBE masih dalam proses pencapaian target akhir RPJMD.
2. ketersediaan data statistik sektoral tidak mencapai target dikarenakan pada waktu pelaporan, data belum sepenuhnya terkumpul.
3. pada saat penilaian KIP, kepala daerah tidak dapat menghadiri secara langsung, sehingga mempengaruhi nilai akhir yang diperoleh.
4. adanya perubahan metode penilaian dari evaluator SAKIP sehingga mengakibatkan belum tercapainya target akhir yang dipasang.

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel dibawah ini :

tabel T-C.29
rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dinas kominfo dan pencapaian renja s/d th 2024 (n-2) Kota Pekalongan

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Realisasi 2021	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian Target 2023
						Target 2024	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	3.30	2.80		3.10	3.25	3.25	98,48	belum tercapai
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum	persen	100	100		100	100.52	100.52	100.52	tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Realisasi 2021	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian Target 2023
						Target 2024	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100	66		100	100	100	100	tercapai
	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	3.74	0.93		2.80	2.80	2.80	74,86	belum tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

1. optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*smart governance*);
2. meningkatnya kualitas layanan publik (*smart governance*).

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2024	Tahu n 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat kota			96.00	97.00	97.20	97.50	96.62	96.03	97.00	97.20	
2	Indeks domain tatakelola SPBE			2.95	3.05	3.15	3.25	3.20	3.30	3.05	3.15	
3	Indeks tata kelola KAMI			II	II	II	II	II	III+	II	II	
4	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral			70	73	76	80	77.73	94.84	73	76	
5	Nilai LKJIP			87.00	88.00	89.00	90	87.60	83.40	88.00	89.00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.29	81.54	81.79	82.04	95.95	89.62	81.54	81.79	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seperti proses kerja Perencanaan melalui beberapa tahap dari Musrenbang, Usulan dan proses sidang di Komisi dan Sidang di Badan Anggaran dengan berlakunya Perwal ASB Analisis Standar Belanja maka perlakuan penyusunan RAB juga disesuaikan seperti beberapa rekomendasi di Desk Renja tahun sebelumnya sebagai berikut :

- a. secara umum, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pengurangan kegiatan yang dijalankan, seperti kegiatan pelatihan, review SPBE, kegiatan pemeliharaan jaringan dan penyediaan bandwidth internet.

- b. dampak terhadap pencapaian visi-misi antara lain :
- dampak adanya efisiensi anggaran terhadap pencapaian indeks SPBE menyebabkan beberapa aspek pada penilaian SPBE yang tidak bisa optimal.
 - adanya efisiensi anggaran berdampak pada kurang optimalnya pembangunan infrastruktur Fiber Optik dalam menjangkau seluruh unit kerja di pekalongan. Pengembangan jaringan FO saat ini belum mencapai 100%, sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat 102 OPD dan Unit Kerja yang sudah tersambung FO, dari total seluruh Unit Kerja sejumlah 165 Unit.
- c. Tantangan dalam melaksanakan Layanan pada dinkominfo daam optimalisasi kinerja SDM dalam menjalankan program dan kegiatan adalah :
- Peningkatan kebutuhan akan informasi terhadap kinerja OPD oleh berbagai pihak, mengharuskan transparansi dan akuntabilitas kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban OPD dalam menggunakan APBD Kota Pekalongan;
 - Peningkatan kinerja dan efisiensi LPPL Batik TV dan RKB yang saat ini bersaing dengan media sosial, *citizen journalist*, harus ditingkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dalam menyebarkan informasi;
 - Kerjasama media dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di Kota Pekalongan terus dilaksanakan dalam pembentukan pola komunikasi yang baik dan efektif;
 - Ekspansi Jaringan Fiber Optic (FO) Batiknet pada tahun 2026 tidak dianggarkan dikarenakan keterbatasan anggaran APBD 2026;
 - Pelaksanaan penilaian indeks SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik) oleh Menpan RB ;
 - Peningkatan kapasitas SDM digital dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi digital seperti artificial Intelegence, serangan siber, pemberantasan judi online, dll;
 - Peningkatan pemahaman literasi digital untuk masyarakat kota Pekalongan;
 - Pelaksanaan kegiatan Smart City yang tupoksinya dikembalikan ke Dinkominfo;

- Pembangunan Gedung RKB sesuai DED yang sudah disusun di tahun 2019 diusulkan 1,5 Miliar mengingat gedung yang digunakan saat ini sudah mengalami roboh diantaranya ruang dapur dan ruang kamar mandi dan semuanya sudah resiko tinggi
 - Sarana dan Peralatan Studio Mini Batik TV untuk siaran LIVE Outdoor dimaksudkan seperti layaknya di TV Swasta bahwa pengambilan informasi secara live bisa ditayangkan mengingat studio mini bisa berjalan di lingkungan wilayah Kota Pekalongan, hal itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.056.767.600,-
 - Penyelesaian pembangunan lantai 2 kantor Dinkominfo yang terletak di Jl. Majapahit No. 5 Kecamatan Pekalongan Barat.
- d. Peluang dalam melaksanakan Layanan pada dinkominfo dalam optimalisasi kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah :
- Meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas kinerja OPD dengan memanfaatkan teknologi digital;
 - Meningkatkan kapabilitas LPPL Batik TV dan Radio Kota Batik dalam menyebarluaskan informasi dengan sarana dan prasarana penyiaran digital yang sudah dimiliki;
 - Kolaborasi dengan berbagai media lokal / regional dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
 - Memaksimalkan kapasitas jaringan *fiber optic* (FO) yang telah dibangun dengan mengkomibnasikan dengan jaringan radio nirkabel sebagai alternatif dalam ekspansi jaringan batiknet;
 - Peningkatan kualitas literasi digital SDM dinkominfo dan masyarakat Kota Pekalongan dengan memanfaatkan Roadshow TIK dan pelatihan di berbagai lokasi;
 - Memanfaatkan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia dengan lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan retribusi LPPL.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sehubungan dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka semua program dan kegiatan mengalami perubahan total sehingga Bapperida

Kota Pekalongan telah mengadakan proses kerja secara bertahap melalui pemetaan kegiatan dari DPPA 2025 dikelompokkan sesuai indikator keluaran lalu dimapping masuk kegiatan yang sudah disediakan di Permendagri 90 Nomor 05-5889 Tahun 2021, Adapun Langkah yang harus disusun berikut :

1. Pagu nggaran disesuaikan dengan kinerja dan tupoksi masing-masingbidang / sekretariat;
2. Penyesuaian dengan indikator keluaran;
3. Penyesuaian dengan permendagri 90 tahun 2019;
4. Penyesuaian kode rekening pada rincian belanja Renja 2026;

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Pekalongan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Komunikasi dan Informatika				13.151.452.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				13.041.780.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.542.566.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.174.867.000,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.542.566.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.174.867.000,00	
1	Relasi Media	Pekalongan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif	12 Laporan	836.152.000	Relasi Media	Pekalongan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif	12 Laporan	709.440.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dalam kegiatan relasi media					dalam kegiatan relasi media			
2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pekalongan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	43.660.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pekalongan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	43.660.000,00	
3	Pelayanan Informasi Publik	Pekalongan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	151.980.000	Pelayanan Informasi Publik	Pekalongan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	112.328.000,00	
4	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pekalongan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pekalongan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0 Persentase	0	
5	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi	Pekalongan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu	12 Rekomendasi	433.710.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi	Pekalongan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu	12 Rekomendasi	442.172.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Publik		publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			Publik		publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
6	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pekalongan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2.927.568.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pekalongan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2.739.284.000,00	
7	Penyusunan Konten	Pekalongan	Jumlah Konten Informasi Publik	12500 Konten	129.496.000	Penyusunan Konten	Pekalongan	Jumlah Konten Informasi Publik	9500 Konten	127.983.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.618.428.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.306.178.000,00	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup				20.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup				20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
8	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	6 Dokumen	20.000.000	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.598.428.000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.286.178.000,00	
9	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pekalongan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	79.420.000	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pekalongan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	79.420.000	
10	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Pekalongan	Jumlah dokumen koordinasi	3 dokumen	107.850.000	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Pekalongan	Jumlah dokumen koordinasi	2 dokumen	107.850.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelaksanaan manajemen SPBE					pelaksanaan manajemen SPBE			
11	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pekalongan	jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	181 Perangkat Daerah	1.404.350.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pekalongan	jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	181 Perangkat Daerah	1.092.100.000,00	
12	Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	Pekalongan	jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintah, dan/atau portal data nasional	5 layanan	49.470.000	Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	Pekalongan	jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintah, dan/atau portal data nasional	5 layanan	49.470.000	
13	fasilitasi penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan	Pekalongan	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraa	1 dokumen	100.000.000	fasilitasi penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan	Pekalongan	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraa	2 dokumen	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dinas kominfo		n audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo			dinas kominfo		n audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo			
14	koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Pekalongan	jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 aplikasi	395.158.000	koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Pekalongan	jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 aplikasi	395.158.000,00	
15	koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pekalongan	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	10 laporan	167.900.000	koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pekalongan	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	10 laporan	167.900.000	
16	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE	Pekalongan	jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi	1 dokumen	94.280.000	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE	Pekalongan	jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi	1 dokumen	94.280.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah		arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah			meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah		arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah			
17	koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	pekalongan	jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	1 dokumen	100.000.000	koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	pekalongan	jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	2 dokumen	100.000.000	
18	koordinasi pengelolaan data dan informasi	pekalongan	jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 dokumen	100.000.000	koordinasi pengelolaan data dan informasi	pekalongan	jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 dokumen	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				109.120.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				107.460.000,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				109.120.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				107.460.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Pekalongan	presentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	109.120.000	pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Pekalongan	presentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	107.460.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				179.773.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				179.773.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				149.773.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				149.773.000	
20	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pekalongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	1 laporan	33.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pekalongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	1 laporan	33.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Non Elektronik					Non Elektronik			
21	pengelolaan sumberdaya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan	pekalongan	jumlah laporan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan	1 laporan	50.000.000	pengelolaan sumberdaya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan	pekalongan	jumlah laporan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan	1 laporan	50.000.000	
22	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 PERANGKAT DAERAH	50.546.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat daerah	50.546.000	
23	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16.227.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16.227.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Ditetapkan					yang Ditetapkan			
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan			30.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan			30.000.000	
24	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah operasionalisasi layanan keamanan dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	1 kegiatan	30.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah operasionalisasi layanan keamanan dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	1 kegiatan	30.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.701.565.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.273.502.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran,				26.000.000	Perencanaan, Penganggaran,				17.405.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.642.000,00	
26	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 DOKUMEN	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 DOKUMEN	1.763.000,00	
27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.345.471.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.678.913.000,00	
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ORANG/BULAN	4.300.101.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ORANG/BULAN	4.626.671.000,00	Adanya usulan tambahan pegawai ASN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pada pengad aan ASN 2026 (3 PPPK 1 CPNS)
29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	43.870.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.570.000,00	
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 LAPORAN	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 LAPORAN	1.672.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				143.110.000,00	
31	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	2 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	1 Paket	5.000.000,00	Rasionalisasi anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an Bangunan Kantor yang Disediakan					an Bangunan Kantor yang Disediakan			pada renja akhir 2026 dari 2 paket mjd 1 paket
32	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	138.110.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	138.110.000,00	sumber dana DBHCHT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				343.960.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				347.870.000,00	
33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000..000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000..000	
34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.460.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	116.460.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	121.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	82.420.000,00	
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	29.200.000	
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	16.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.150.000,00	
39	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	90.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	91.640.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				613.920.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				613.920.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah					Daerah					
40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.700.000	
41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 LAPORAN	501.220.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 LAPORAN	501.220.000	
42	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAPORAN	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAPORAN	129.240.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				362.214.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				453.264.000,00	
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 UNIT	220.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 UNIT	210.320.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir RKPD)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 UNIT	54.614.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 UNIT	150.614.000,00	
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	87.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	92.330.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkauan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", sesuai siaran pers Bappenas. Tema ini menjadi landasan untuk mewujudkan Prioritas Nasional yang sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden, serta RPJMN 2025-2029.

Klaster Kedaulatan Pangan dan Energi:

- **Optimalisasi Bulog:** Peningkatan peran Badan Urusan Logistik dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
- **Pelaksanaan Lumbung Pangan (*Food Estate*):** Pengembangan lumbung pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
- **Peningkatan Bauran Ethanol dan Biodiesel:** Peningkatan penggunaan energi terbarukan dari bahan bakar nabati.
- **Energi Terbarukan:** Pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- **Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM):** Pembangunan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir untuk menjamin ketersediaan air bersih.
- **Pengelolaan Sampah:** Peningkatan pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Klaster Ekonomi Produktif dan Inklusif:

- **Percepatan Renovasi Sekolah:** Peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan melalui renovasi sekolah.
- **Ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG):** Program untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
- **Sekolah Unggulan:** Peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan.
- **Cek Kesehatan:** Program pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat.
- **Percepatan Rumah Sakit Daerah:** Peningkatan fasilitas kesehatan di daerah melalui percepatan pembangunan rumah sakit.
- **Digitalisasi Pendidikan:** Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan.
- **Sekolah Rakyat:** Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

- **Reformasi Birokrasi:** Peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi.
- **Kemudahan Berbisnis:** Penyederhanaan birokrasi dan regulasi untuk menarik investasi.
- **Ketertarikan Investasi:** Peningkatan iklim investasi melalui kebijakan yang mendukung.
- **Komponen Cadangan:** Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara.
- **Pemenuhan Alutsista:** Peningkatan kemampuan alat utama sistem persenjataan.
- **Penguatan Kemampuan Teritorial:** Peningkatan kemampuan pertahanan wilayah.

Selain itu, RKP 2026 juga menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, serta memastikan pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa target indikatif yang ingin dicapai antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,8% - 6,3%, pendapatan per kapita USD 5.870, tingkat kemiskinan 6,5% - 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44% - 4,96%, rasio gini 0,377 - 0,380, indeks modal manusia 0,57, penurunan intensitas emisi GRK 37,14%, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, akan fokus pada peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan religiusitas masyarakat. Ini sejalan dengan visi Kota Pekalongan yang ingin mewujudkan kota yang sejahtera, mandiri, dan religius.

Beberapa poin penting yang menjadi prioritas pembangunan Kota Pekalongan 2026, termasuk:

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan pelayanan publik, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan infrastruktur.

Beberapa usulan rencana pembangunan yang disampaikan mencakup bidang kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, pariwisata, kebudayaan, pertanahan, dan perhubungan.

Pemerintah Kota Pekalongan juga akan terus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan, termasuk melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan konsultasi publik

b. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah, terutama sektor batik dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan perdagangan.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan program-program pengembangan keterampilan, serta memastikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

d. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab.

e. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

f. Pengembangan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan pengelolaan air bersih.

g. Penerapan Smart City

Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah Dinkominfo Kota Pekalongan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
2. Mewujudkan transparansi pelayanan publik berbasis digital

3. Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
5. mewujudkan keamanan informasi daerah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas kominfo Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi Dinas kominfo Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya layanan informasi publik;
3. Meningkatnya tata kelola SPBE;
4. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;
5. Meningkatnya kematangan penerapan manajemen keamanan informasi;

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Dinas Kominfo antara lain :

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Pekalongan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Komunikasi dan Informatika				13.041.780.000	APBD			
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.174.867.000	APBD		100 persen	4.522.566.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.174.867.000	APBD		100persen	4.522.566.000
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	pekalongan	12 Laporan	709.440.000	APBD		12 Laporan	836.152.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	pekalongan	2 Komunitas	43.660.000	APBD		2 Komunitas	43.660.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	pekalongan	30 Permohonan	112.328.000	APBD		30 Permohonan	151.980.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring	Jumlah rekomendasi komunikasi	pekalongan	12	442.172.000	APBD		12	433.710.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		Rekomendasi				Rekomendasi	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	pekalongan	2 Media	2.739.284.000	APBD		2 Media	2.927.568.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	pekalongan	9500 Konten	127.983.000	APBD		9500 Konten	129.496.000
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.306.178.000	APBD		100 Persen	2.618.428.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	APBD		100 persen	20.000.000
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggara n Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pekalongan	3 dokumen	20.000.000	APBD		3 Dokumen	20.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.286.178.000	APBD		32,91 persen	2.598.428.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Pekalongan	2 Aplikasi	79.420.000	APBD		2 Aplikasi	79.420.000
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Pekalongan	3 dokumen	107.850.000	APBD		3 Dokumen	107.850.000
2.16.03.2.02.0015	Penyelenggaraa n Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pekalongan	181 Perangkat Daerah	1.092.100.000	APBD		30 Perangkat Daerah	1.404.350.000
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintah, dan/atau portal data nasional	Pekalongan	5 layanan	49.470.000	APBD		5 Layanan	49.470.000
2.16.03.2.02.0020	fasilitasi penyelenggaraa n audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	Pekalongan	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0024	koordinasi pembangunan	jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan	Pekalongan	3 aplikasi	395.158.000	APBD		3 Aplikasi	395.158.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE							
2.16.03.2.02.0025	koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pekalongan	10 laporan	167.900.000	APBD		10 Laporan	167.900.000
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Pekalongan	1 dokumen	94.280.000	APBD		1 Dokumen	94.280.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	anggaran SPBE pemerintah daerah								
2.16.03.2.02.0029	koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraa n kabupaten atau kota cerdas	jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Pekalongan	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0003	koordinasi pengelolaan data dan informasi	jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah	Pekalongan	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				107.460.000	APBD		100 Persen	109.120.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				107.460.000	APBD		1 Dokumen	109.120.000
2.20.02.2.01.0010	pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	presentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pekalongan	100%	107.460.000	APBD		100 %	109.120.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				179.773.000	APBD		76 Persen	179.773.000
2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				149.773.000	APBD		8 Persen	149.773.000
2.21.02.2.01.001	Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Pekalongan	4 laporan	33.000.000	APBD		4 Laporan	33.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
2.21.02.2.01.0003	pengelolaan sumberdaya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan	jumlah laporan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan	Pekalongan	2 laporan	50.000.000	APBD		2 Laporan	50.000.000
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		30 PERANGKAT DAERAH	50.546.000	APBD		30 Perangkat Daerah	50.546.000
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang		2 Dokumen	16.227.000	APBD		2 Dokumen	16.227.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan							
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	APBD		100Persen	30.000.000
2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasionalisasi layanan keamanan dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	Pekalongan	1 kegiatan	30.000.000	APBD		1 Kegiatan	30.000.000
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.273.502.000,00	APBD		100 Persen	5.701.565.000
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.405.000	APBD		100 persen	26.000.000
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	2 dokumen	3.642.000	APBD		2 Dokumen	12.500.000
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Pekalongan	2 dokumen	1.763.000	APBD		2 Dokumen	1.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	15 laporn	12.000.000	APBD		15 Laporan	12.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.678.913.000	APBD		100 persen	4.345.471.000
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	34 orang/bulan	4.626.671.000	APBD		34 Orang/bulan	4.300.101.000
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	12 dokumen	43.870.000	APBD		12 Dokumen	43.870.000
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	1 laporan	1.672.000	APBD		1 Laporan	1.500.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				153.110.000	APBD		100 Persen	153.110.000
2.16.01.2.05.0010	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	2 paket	10.000.000	APBD		2 Paket	10.000.000
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Pekalongan	100 orang	138.110.000	DBHCHT		100 orang	138.110.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perundang- Undangan	Undangan							
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				347.870.000	APBD		100 Persen	343.960.000
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	4 paket	6.000.000	APBD		4 Paket	6.000.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	4 paket	116.460.000	APBD		4 Paket	71.460.000
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pekalongan	4 paket	10.000.000	APBD		4 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekalongan	4 paket	82.420.000	APBD		4 Paket	121.000.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pekalongan	13 paket	29.200.000	APBD		13 Paket	29.200.000,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Pekalongan	2 dokumen	12.150.000,00	APBD		2 Dokumen	16.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Peraturan Perundang- undangan	Undangan yang Disediakan							
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	80 laporan	90.300.000	APBD		80 Laporan	90.300.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				632.940.000	APBD		100 Persen	613.920.000
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	4 laporan	2.700.000	APBD		4 Laporan	2.700.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pekalongan	12 laporan	501.000.000	APBD		12 Laporan	501.220.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekalongan	12 laporan	129.240.000	APBD		12 Laporan	110.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				453.264.000	APBD		100 Persen	362.214.000
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pekalongan	24 unit	210.320.000	APBD		24 Unit	220.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekalongan	3 unit	150.614.000	APBD		3 Unit	54.614.000
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekalongan	50 unit	92.330.000	APBD		50 Unit	87.600.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Di Dalam rumusan rencana program kegiatan bagi OPD tahun 2026 dan prakiraan maju 2027 Sebagai bahan evaluasi terdapat target (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai), masing-masing kegiatan terdapat keluaran dan Hasil. Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2026 ke 2027 dikarenakan kenaikan tarif tahunan dan standarisasi, selain itu juga kenaikan atau penurunan yang menurut evaluasi indikator diantara sub kegiatan sama dipadukan dan dihitung ulang mengalami penurunan yang semula menyebar menjadi satu pelaksanaan di salah satu sub kegiatan juga dari memonitor viewer yang kurang untuk dihapus dan mengambil viewer memuat berita pemerintahan Kota Pekalongan.

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2026. Kebutuhan pendanaan pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
Tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
Dinas Komunikasi dan Informatika			13.041.780.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.041.780.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN			12.754.547.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	6.273.502.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.405.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.642.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.763.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.678.913.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.626.671.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.570.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.672.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	143.110.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	138.110.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	347.870.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	6.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	116.460.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	82.420.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	29.200.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.150.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	91.640.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	632.940.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.700.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	501.220.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.240.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	453.264.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	210.320.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.614.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	92.330.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 Persen	4.174.867.000,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	100 persen	4.174.867.000,00
Relasi Media			
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	709.440.000,00
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	43.660.000,00
Pelayanan Informasi Publik			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang	30 Permohonan	112.328.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	diselesaikan sesuai peraturan perundangan		
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	442.172.000,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2.739.284.000,00
Penyusunan Konten			
	Jumlah Konten Informasi Publik	9500 Konten	127.983.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan pusat data pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	2.306.178.000,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain yang disediakan Dinas Kominfo	100 persen	20.000.000,00
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub	6 Dokumen	20.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	24,36 persen	2.286.178.000,00
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	79.420.000,00
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	107.850.000,00
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	80 Perangkat Daerah	1.092.100.000,00
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	5 Layanan	49.470.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	100.000.000,00
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	395.158.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	10 Laporan	167.900.000,00
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola	1 Dokumen	94.280.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	100.000.000,00
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2 Dokumen	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			107.460.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 Persen	107.460.000,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Dokumen	107.460.000,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	107.460.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			179.773.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase sistem elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik	41,18 Persen	179.773.000,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	8,00 persen	149.773.000,00
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	33.000.000,00
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	50.000.000,00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	30 Perangkat Daerah	50.546.000,00
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			
	Jumlah Kebijakan Tata	2 Dokumen	16.227.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator 2026	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian		
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen	30.000.000,00
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			
	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	30.000.000,00
			13.041.780.000,00

BAB V

PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2026 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan, serta sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2026. Penyusunan Renja 2026 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan dinas kominfo kota pekalongan satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan ini dapat menjadi acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkait serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfo telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2026, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Dinkominfo disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinkominfo Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinkominfo, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang pada Dinkominfo, agar segera menyusun rencana kerja anggaran (RKA) masing masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Dengan demikian, diharapkan renja dinas kominfo tahun 2026 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan dinas kominfo kota pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan komunikasi dan informatika kota pekalongan di tahun mendatang.

Demikian Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Terima kasih.

Pekalongan, 4 Agustus 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos

NIP. 19711017 199903 1 007